



Pancasila Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiah Nur Atqiya², Nauroh Aisy Salsabila³,
Naella Alfi Syarifah⁴, Sisil Larassati⁵, Mahmud Isma'il Marzuki⁶

Direktur pusat studi konstitusi dan hukum islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia¹
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia²

Universitas Negeri Islam Raden Mas Said (UIN RMS) Surakarta, Indonesia^{3,4,5,6}

nasohamustain@gmail.com^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², naurohais@gmail.com³,
naellasyarifah@gmail.com⁴, sisillarassati@gmail.com⁵, cepugaming99@gmail.com⁶

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
57168

Korespondensi email: nasohamustain@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the role and implementation of Pancasila in three periods of government in Indonesia: Old Order, New Order, and Reformasi. Pancasila, as a state ideology, has undergone various changes in interpretation and application in accordance with the political and social dynamics that occur in each era. Under Soekarno's leadership in the Old Order, Pancasila was used as a unifying tool in the context of ideological pluralism, but faced internal and external challenges that threatened national stability. During the New Order period, Pancasila was used as a single principle used to strengthen political legitimacy, but it was often misused to silence criticism and opposition. The reforms brought greater political freedom and a more inclusive interpretation of Pancasila, but still faced challenges in overcoming radicalization, intolerance, and social disparities. This research concludes that although Pancasila remains relevant as the basis of the state, efforts are needed to actualize its values to suit the challenges of the times.*

Keywords: Pancasila, Implementation, Order, Reform

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan implementasi Pancasila pada tiga periode pemerintahan di Indonesia: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pancasila, sebagai ideologi negara, telah mengalami berbagai perubahan interpretasi dan aplikasi sesuai dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi di setiap era. Di bawah kepemimpinan Soekarno pada Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu dalam konteks pluralisme ideologis, namun menghadapi tantangan internal dan eksternal yang mengancam stabilitas nasional. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal yang digunakan untuk memperkuat legitimasi politik, namun sering kali disalahgunakan untuk membungkam kritik dan oposisi. Reformasi membawa kebebasan politik yang lebih besar dan interpretasi Pancasila yang lebih inklusif, namun tetap menghadapi tantangan dalam mengatasi radikalisme, intoleransi, dan kesenjangan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara, diperlukan upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilainya agar sesuai dengan tantangan zaman.

Kata kunci: Pancasila, Implementasi, Orde, Reformasi

1. PENDAHULUAN

Pembuatan jurnal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami peran dan relevansi Pancasila dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi negara, telah menjadi pondasi dalam berbagai kebijakan politik, sosial, dan ekonomi sejak kemerdekaan. Namun, implementasi dan interpretasi Pancasila mengalami dinamika yang berbeda di setiap era pemerintahan, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Beberapa alasan utama pembuatan jurnal ini adalah:

a. **Menggali Perubahan Implementasi Pancasila di Tiga Era**

Masing-masing era (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi) memiliki cara yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan Pancasila. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membahas perbedaan implementasi tersebut serta dampaknya terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

b. **Menjelaskan Relevansi Pancasila dalam Konteks Politik dan Sosial**

Setiap era pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh tantangan politik dan sosial yang unik. Pancasila kerap dijadikan alat untuk menjaga stabilitas dan persatuan nasional. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pancasila diadaptasi dalam menghadapi perubahan politik dan sosial di tiap era.

c. **Memperdalam Pemahaman Sejarah Pancasila**

Memahami sejarah Pancasila penting bagi penguatan identitas nasional Indonesia. Dengan menelusuri implementasi Pancasila di setiap era pemerintahan, jurnal ini diharapkan dapat memperdalam wawasan tentang bagaimana ideologi ini terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman.

d. **Menyediakan Landasan Akademis untuk Penelitian Lebih Lanjut**

Jurnal ini juga bertujuan untuk menjadi sumber referensi akademis bagi penelitian lebih lanjut mengenai peran ideologi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan penerapan Pancasila dapat membantu peneliti lain dalam mengembangkan kajian terkait ideologi dan politik di Indonesia.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, adalah landasan filosofis yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, Pancasila adalah sebuah kompromi yang dirumuskan melalui diskusi panjang antara para pemimpin bangsa dari berbagai latar belakang ideologis, seperti nasionalis, agamis, dan sosialis. Pancasila dimaksudkan sebagai landasan filosofis yang inklusif, yang dapat mengakomodasi pluralitas bangsa Indonesia. Lima sila Pancasila yang terdiri dari: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah cerminan dari berbagai nilai universal yang diyakini akan mampu menyatukan seluruh elemen bangsa dalam bingkai negara kesatuan yang berdaulat.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, mengakui keberagaman keyakinan spiritual di Indonesia, tanpa secara spesifik menyebutkan agama tertentu sebagai agama negara. Ini merupakan keputusan penting dalam meredam ketegangan antara

kelompok-kelompok religius yang berbeda, serta memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi negara teokrasi. Sila ini juga menegaskan pentingnya keberagaman agama dan keyakinan sebagai bagian dari identitas bangsa. Sementara itu, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menggarisbawahi prinsip-prinsip kemanusiaan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat individu, serta keadilan sosial yang menjadi basis interaksi antar-warga negara.

Dalam konteks internasional, Pancasila juga dipandang sebagai landasan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan negara-negara lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman, mengingat Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau, suku, dan bahasa yang berbeda. Kesadaran akan persatuan menjadi penting untuk menjaga integritas wilayah dan kedamaian dalam negeri. Sementara itu, sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menegaskan nilai demokrasi deliberatif yang menghargai musyawarah sebagai cara utama dalam pengambilan keputusan. Akhirnya, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengamanatkan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh **Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)**, Pancasila lahir dari perenungan mendalam tentang keragaman budaya, agama, suku, dan kepentingan yang ada di Indonesia. Lima sila Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi penopang kehidupan bangsa. Pancasila tidak hanya mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi panduan moral dan politik dalam menjalankan pemerintahan serta interaksi sosial.

Sejak awal kemerdekaan, Pancasila dihadapkan pada berbagai tantangan politik dan ideologis, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka dari penjajahan selama lebih dari tiga abad, berusaha mencari bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya yang pluralis. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi tarik menarik ideologis antara berbagai golongan, seperti nasionalis, Islam, dan komunis, yang masing-masing memiliki visi berbeda tentang arah pembangunan bangsa. Pancasila hadir sebagai jawaban untuk menyatukan visi tersebut, menawarkan dasar yang universal dan dapat diterima oleh semua pihak, terlepas dari latar belakang ideologi, agama, atau suku. Namun, implementasi Pancasila di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Sejak kemerdekaan, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara mengalami berbagai

perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial yang berkembang. Setiap masa pemerintahan membawa interpretasi yang berbeda terhadap nilai-nilai Pancasila, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan dan orientasi pembangunan bangsa. (Jimly, 2006.)

Sejak awal kemerdekaan, Pancasila dihadapkan pada berbagai tantangan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka dari penjajahan Belanda selama lebih dari tiga abad, menghadapi tugas monumental untuk membangun sistem pemerintahan yang stabil dan sesuai dengan karakter masyarakat yang pluralistik. Pada masa-masa awal kemerdekaan, terjadi perdebatan ideologis yang tajam di antara berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Kelompok nasionalis, Islam, dan komunis memiliki visi yang berbeda mengenai bagaimana arah pembangunan negara yang baru ini harus dijalankan.

Kelompok nasionalis yang dipimpin oleh Soekarno mendorong persatuan nasional di atas semua perbedaan, dengan Pancasila sebagai simbol persatuan tersebut. Mereka melihat Pancasila sebagai dasar yang dapat mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat Indonesia tanpa memaksakan satu ideologi tertentu. Di sisi lain, kelompok Islam, yang ingin melihat syariat Islam diterapkan secara resmi dalam konstitusi negara, merasa bahwa sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya lebih eksplisit dalam mengakui Islam sebagai dasar negara. Sementara itu, kelompok komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), melihat Pancasila sebagai landasan yang dapat disesuaikan dengan ideologi sosialisme, terutama dalam aspek keadilan sosial.

Tarik menarik kepentingan ideologis ini berpuncak pada munculnya berbagai gerakan politik di masa-masa awal kemerdekaan, yang menantang pemerintahan pusat di Jakarta. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, gerakan PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi, hingga G30S/PKI pada tahun 1965 adalah contoh dari dinamika politik yang menunjukkan betapa rapuhnya kesatuan nasional di masa-masa awal. Pancasila, dalam hal ini, diuji sebagai dasar pemersatu yang harus mampu meredam berbagai konflik ideologis yang muncul. (Ricklefs, M. C. 2008)

Pada masa **Orde Lama** (1945-1966), di bawah kepemimpinan Presiden **Soekarno**, Pancasila dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa di tengah tantangan politik yang sangat dinamis. Soekarno menghadapi tantangan besar untuk menjaga integritas nasional, terutama di tengah perpecahan ideologis antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Dalam upayanya untuk menyatukan berbagai kelompok ideologis tersebut, Soekarno menciptakan konsep **Nasakom** (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), yang bertujuan untuk merangkul seluruh kekuatan politik yang ada. Pancasila, dalam konteks ini, menjadi simbol

persatuan nasional di tengah perbedaan. Namun, periode ini juga ditandai oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta meningkatnya ketegangan ideologis, yang berpuncak pada peristiwa **G30S/PKI** pada tahun 1965.

Masa **Orde Baru** (1966-1998) menandai era baru dalam sejarah Indonesia di mana Pancasila mengalami interpretasi yang berbeda. Setelah jatuhnya Soekarno, **Soeharto** naik ke tampuk kekuasaan dengan membawa visi stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai dasar legitimasi politik dan sosial yang sangat sentral dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berupaya keras untuk menekankan pentingnya Pancasila sebagai asas tunggal melalui program **Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)**. Program ini mewajibkan setiap warga negara, organisasi, dan partai politik untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan. Pancasila juga digunakan sebagai alat kontrol terhadap berbagai potensi disintegrasi dan perlawanan terhadap pemerintah, termasuk penindasan terhadap gerakan oposisi dan kritik.

Namun, kebijakan Orde Baru, meskipun berhasil membawa stabilitas ekonomi dan politik selama beberapa dekade, tidak lepas dari kritik. Pancasila, yang seharusnya menjadi panduan moral dan ideologis bangsa, sering digunakan sebagai dalih untuk membenarkan tindakan represif pemerintah terhadap kelompok yang dianggap bertentangan dengan visi pemerintah. Kebebasan politik dan hak asasi manusia ditekan, dan banyak kritikus menyatakan bahwa Pancasila pada masa ini dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto dan membungkam perbedaan pendapat. Akibatnya, Pancasila di mata sebagian masyarakat menjadi simbol kontrol politik daripada nilai-nilai kebangsaan yang hidup dan dinamis. (Suhartono, Agus, 1993.)

Keberhasilan gerakan pro-demokrasi pada tahun 1998 yang berujung pada runtuhnya Orde Baru, menandai dimulainya era **Reformasi**. Pada masa Reformasi, terjadi perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Demokratisasi menjadi prioritas utama, dan kebebasan politik serta hak asasi manusia mendapat perhatian lebih besar. Dalam konteks ini, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, tetapi tidak lagi dipaksakan sebagai asas tunggal. Reformasi membuka jalan bagi pluralisme politik, yang memungkinkan berbagai pandangan dan ideologi berkembang dalam kerangka demokrasi. Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 merupakan salah satu periode paling signifikan dalam sejarah politik Indonesia. Periode ini ditandai oleh perubahan besar dalam struktur pemerintahan, demokratisasi, dan penguatan nilai-nilai hak asasi manusia.

Reformasi muncul sebagai respons terhadap krisis multidimensional yang melanda Indonesia, termasuk krisis ekonomi yang parah, korupsi yang merajalela, pelanggaran hak asasi manusia, serta pengekanan kebebasan politik di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Sebelum memasuki era Reformasi, Indonesia berada di bawah pemerintahan yang otoriter selama lebih dari tiga dekade. Pancasila, sebagai dasar negara, sering kali disalahgunakan untuk membenarkan tindakan represif pemerintah. Meskipun Pancasila seharusnya menjadi panduan moral dan ideologis bagi bangsa, pada praktiknya, nilai-nilainya seringkali terdistorsi untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan oposisi. Hal ini menyebabkan frustrasi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang mendambakan perubahan dan reformasi politik.

Kondisi ini semakin memburuk dengan terjadinya krisis ekonomi Asia pada akhir 1997 yang menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran, dan kemiskinan meluas. Rakyat Indonesia merasa semakin terpinggirkan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan semakin meningkat. Berbagai gerakan pro-demokrasi muncul, menggugah kesadaran politik masyarakat untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses politik. Demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menjadi sorotan utama media, menciptakan gelombang tekanan yang akhirnya mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri pada bulan Mei 1998.

Dengan jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi yang membuka ruang bagi kebangkitan demokrasi. Reformasi membawa banyak perubahan, termasuk amandemen UUD 1945 yang memperkuat posisi rakyat dalam pemerintahan. Kebebasan pers dan kebebasan berbicara mulai dihormati, memungkinkan berbagai suara, termasuk kritik terhadap pemerintah, untuk disampaikan tanpa rasa takut akan represi. Partisipasi politik meningkat, dengan munculnya berbagai partai politik baru yang mewakili beragam kepentingan masyarakat.

Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, namun interpretasinya mengalami perubahan. Dalam konteks Reformasi, Pancasila tidak lagi dipaksakan sebagai asas tunggal, melainkan dihargai sebagai nilai dasar yang dapat diaktualisasikan sesuai dengan dinamika zaman. Hal ini memungkinkan berbagai ideologi dan pandangan untuk berkembang dalam kerangka demokrasi yang lebih inklusif. Namun, tantangan baru muncul, seperti radikalisme, intoleransi, dan kesenjangan sosial yang semakin meningkat. Masyarakat mulai mempertanyakan relevansi Pancasila di tengah realitas politik dan sosial yang kompleks.

Namun, Reformasi juga membawa tantangan baru bagi Pancasila. Kebebasan yang lebih besar di bidang politik dan ekonomi membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan politik Indonesia. Pancasila, meskipun masih diakui sebagai dasar negara, sering kali dipertanyakan relevansinya di tengah meningkatnya tantangan global, seperti radikalisme, intoleransi, dan kesenjangan sosial. Banyak pihak merasa bahwa Pancasila harus diaktualisasikan kembali agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Pada saat yang sama, peran negara dalam menjaga dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila sering kali dipertanyakan, terutama dengan munculnya gerakan-gerakan yang menantang integritas nasional dan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks inilah jurnal ini disusun. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana Pancasila diinterpretasikan dan diterapkan pada tiga periode pemerintahan yang berbeda: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Setiap periode membawa tantangan dan peluang yang berbeda dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan menelusuri perkembangan sejarah Pancasila di tiga era tersebut, jurnal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran ideologi dalam membentuk sistem politik dan sosial di Indonesia. Kajian ini juga penting untuk memahami relevansi Pancasila di tengah tantangan kontemporer yang dihadapi bangsa Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dihidupkan kembali untuk menjaga integritas nasional dan keadilan sosial.

Lebih jauh lagi, jurnal ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi akademis yang dapat membantu peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami bagaimana Pancasila telah digunakan dan diadaptasi sepanjang sejarah Indonesia. Pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan ideologi ini akan membantu mengidentifikasi tantangan masa depan dan cara-cara untuk menjaga Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara yang mempersatukan dan memperkuat bangsa Indonesia. (Sihombing, J. 2020)

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Metode ini dipilih karena memberikan peneliti kesempatan untuk mendalami dan menganalisis perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah serta dinamika sosial-politik yang terjadi di Indonesia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan

interpretasi di balik peristiwa sejarah, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dan diubah seiring berjalannya waktu.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama:

Sumber Primer:

- a. Dokumen Resmi: Naskah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pidato resmi para pemimpin negara seperti Soekarno dan Soeharto. Dokumen ini memberikan konteks hukum dan ideologis mengenai Pancasila di setiap periode.
- b. Arsip Berita dan Laporan Media Massa: Berita dan artikel dari media masa yang mencatat perkembangan politik dan penerapan Pancasila selama Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ini termasuk majalah, surat kabar, dan laporan berita yang relevan.

Sumber Sekunder:

- c. Buku, Artikel, dan Jurnal Akademik: Karya-karya yang membahas tentang Pancasila, sejarah politik Indonesia, serta perubahan sosial yang terjadi di masing-masing era. Ini mencakup analisis dari para akademisi dan peneliti yang mengkaji topik serupa.
- d. Penelitian Terdahulu dan Tesis: Riset-riset sebelumnya yang berfokus pada Pancasila, baik dari sudut pandang ideologis maupun praktis, serta karya-karya akademik yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi Literatur: Peneliti akan melakukan kajian mendalam terhadap buku, artikel, dan dokumen resmi untuk mengumpulkan informasi mengenai penerapan Pancasila di setiap periode. Ini termasuk analisis konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi setiap fase sejarah.
- b. Wawancara: Peneliti akan melakukan wawancara dengan pakar sejarah, politisi, dan akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang Pancasila serta konteks politik Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan perspektif langsung mengenai penerapan Pancasila di setiap era.
- c. Observasi: Pengamatan terhadap peristiwa dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk peringatan hari besar nasional dan kegiatan lain yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Analisis Tematik: Data yang terkumpul akan diorganisir berdasarkan tema yang relevan, seperti interpretasi Pancasila, kebijakan pemerintah, dan dampak sosial-politik dari penerapan Pancasila di setiap periode. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat pola dan tren dalam penerapan Pancasila.
- b. Perbandingan: Peneliti akan melakukan perbandingan antara interpretasi dan penerapan Pancasila di Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam setiap periode, serta dampak dari setiap pendekatan terhadap masyarakat.
- c. Kontekstualisasi: Data yang dikumpulkan akan dianalisis dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing periode. Pendekatan ini membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan dalam penerapan Pancasila dan tantangan yang dihadapi.

Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik:

- a. Triangulasi: Peneliti akan menggunakan beberapa sumber data untuk memverifikasi informasi dan memperkuat validitas temuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak bias dan didukung oleh berbagai perspektif.
- b. Uji Keandalan: Peneliti akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pemeriksaan silang dengan sumber lain. Keandalan data akan diuji dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber.

Penyajian Hasil Penelitian

penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan perjalanan Pancasila dari Orde Lama hingga Reformasi. Penyajian ini akan dilengkapi dengan analisis mendalam mengenai relevansi Pancasila di setiap periode, termasuk perbandingan terhadap tantangan yang dihadapi dan respon pemerintah. Selain narasi, penyajian juga akan mencakup tabel atau diagram yang memvisualisasikan perbandingan antara ketiga periode tersebut. Diagram ini akan membantu pembaca memahami perubahan dan kontinuitas dalam penerapan Pancasila, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan temuan yang komprehensif dan mendalam mengenai Pancasila, serta bagaimana ideologi ini telah beradaptasi dalam konteks sejarah dan dinamika politik Indonesia yang terus berkembang. (Wawancara dengan pakar dan pengamat politik.)

3. HASIL PENELITIAN

Pancasila di Era Orde Lama (1945-1966)

Interpretasi dan Penerapan: Di bawah kepemimpinan Soekarno, Pancasila dianggap sebagai landasan ideologis yang mampu menyatukan beragam ideologi yang ada di Indonesia, seperti nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno memperkenalkan konsep "Nasakom," yang mengusung nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai pilar pemersatu bangsa. Pancasila menjadi simbol persatuan yang mengedepankan keragaman dalam kesatuan. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno sering menekankan pentingnya Pancasila dalam menciptakan kohesi sosial di tengah berbagai perbedaan. Namun, interpretasi ini tidak lepas dari tantangan. Ketegangan politik dan konflik ideologis sering kali mengancam stabilitas yang diharapkan. Munculnya pemberontakan seperti DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan konflik internal di tubuh Partai Komunis Indonesia (PKI) menggambarkan bagaimana Pancasila sebagai simbol persatuan harus berjuang untuk tetap relevan dan diterima oleh semua elemen masyarakat.

Dampak Sosial-Politik: Periode ini ditandai dengan krisis ideologis yang menciptakan ketegangan dan ketidakpastian politik. Pancasila, yang seharusnya menjadi alat pemersatu, sering kali menjadi saksi bisu atas konflik yang berkepanjangan. G30S/PKI pada tahun 1965 menjadi titik balik yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Soekarno, yang menunjukkan bahwa meskipun Pancasila dimaksudkan untuk menyatukan, kekuatan ideologis yang berseberangan sering kali lebih kuat.

Pancasila di Era Orde Baru (1966-1998)

Interpretasi dan Penerapan: Setelah kejatuhan Soekarno, Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan dan mengubah Pancasila menjadi alat legitimasi politik. Dalam pandangan Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal yang diwajibkan untuk dihayati oleh semua elemen masyarakat melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga dijadikan alat untuk mempertahankan stabilitas dan kontrol sosial. Selama masa Orde Baru, Pancasila mengalami pergeseran makna. Alih-alih menjadi simbol persatuan, Pancasila sering kali disalahgunakan untuk membenarkan tindakan represif terhadap oposisi dan kritik terhadap pemerintah. Semua elemen masyarakat, termasuk media, diharuskan untuk mendukung dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yang sering kali diinterpretasikan secara sempit oleh rezim.

Dampak Sosial-Politik: Meskipun periode ini ditandai dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, banyak kalangan yang merasa bahwa Pancasila telah kehilangan

makna sejatinya. Ia menjadi simbol kontrol politik, dan banyak yang melihatnya sebagai bentuk pengekangan kebebasan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi isu yang merajalela, memunculkan rasa frustrasi di kalangan rakyat. Hal ini, pada akhirnya, menciptakan kondisi yang mendukung gerakan pro-demokrasi, yang berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.

Pancasila di Era Reformasi (1998-sekarang)

Interpretasi dan Penerapan: Era Reformasi membawa kebangkitan demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, tetapi interpretasinya mengalami perubahan signifikan. Pancasila tidak lagi dipaksakan sebagai asas tunggal; sebaliknya, nilai-nilainya diaktualisasikan dengan pendekatan yang lebih inklusif. Ini menciptakan ruang bagi dialog dan kerjasama antar berbagai ideologi dan kelompok dalam masyarakat. Kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dijamin oleh reformasi politik memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi yang lebih terbuka mengenai Pancasila. Di era ini, banyak pihak berusaha untuk memahami Pancasila dalam konteks yang lebih luas, serta mencari cara untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak Sosial-Politik: Namun, tantangan baru muncul, seperti radikalisme dan intoleransi, yang mengancam semangat pluralisme yang diusung oleh reformasi. Munculnya kelompok-kelompok yang mengusung ideologi eksklusif dan intoleran menunjukkan bahwa meskipun Pancasila masih diakui sebagai dasar negara, relevansinya sering dipertanyakan. Ini memicu perdebatan mengenai bagaimana Pancasila dapat diaktualisasikan agar tetap berfungsi sebagai pemersatu di tengah kompleksitas sosial dan politik yang ada saat ini.

Perbandingan dan Temuan Kunci

Perbedaan Interpretasi: Setiap era menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam interpretasi Pancasila. Di Orde Lama, Pancasila lebih inklusif dan berusaha mengakomodasi berbagai ideologi. Sebaliknya, di Orde Baru, Pancasila menjadi alat kontrol yang eksklusif dan represif. Era Reformasi memberikan peluang untuk mengaktualisasikan Pancasila dengan pendekatan yang lebih demokratis dan pluralistik.

Kesamaan: Meskipun interpretasi dan penerapannya berubah sepanjang waktu, Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara dalam ketiga periode tersebut. Namun, cara penerapannya mengalami perubahan signifikan sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang berbeda.

Tantangan Kontemporer: Di Era Reformasi, relevansi Pancasila menjadi pertanyaan penting. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengaktualisasikan nilai-nilai

Pancasila agar tetap sesuai dengan tantangan global dan nasional yang kompleks, termasuk isu-isu radikalisme, intoleransi, dan ketidakadilan sosial.

Rekomendasi

Penguatan Pendidikan Pancasila: Diperlukan program pendidikan yang lebih mendalam mengenai Pancasila di institusi pendidikan, agar generasi muda memahami nilai-nilainya dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus mengedepankan pemikiran kritis dan aplikatif, agar peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara lebih berarti.

Dialog Terbuka: Penting untuk mengadakan dialog antar kelompok masyarakat untuk mendiskusikan dan mengembangkan interpretasi Pancasila yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Forum-forum ini dapat memperkuat pemahaman dan kesepahaman di antara berbagai elemen masyarakat, serta mendorong komitmen bersama terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pancasila dapat kembali berfungsi sebagai dasar pemersatu yang kuat di tengah keragaman dan dinamika sosial-politik Indonesia yang terus berkembang. (Syukri, A. 2017)

4. PEMBAHASAN

Orde Lama

Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun negara. Soekarno, sebagai presiden pertama, mencoba menyatukan berbagai kelompok dengan ideologi yang berbeda—nasionalisme, Islam, dan komunisme. Latar belakang politik ini sangat dipengaruhi oleh:

- a. **Diversitas Ideologis:** Indonesia terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki pandangan politik berbeda. Nasionalis, yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), Islam melalui Masyumi dan NU, serta komunis melalui Partai Komunis Indonesia (PKI) semua berusaha untuk berkontribusi dalam pembangunan negara.
- b. **Perang Dingin:** Ketegangan global memengaruhi politik dalam negeri. Soekarno berusaha menjaga Indonesia tetap netral tetapi harus menghadapi tekanan dari blok Barat dan Timur.
- c. **Instabilitas Politik:** Banyaknya pemberontakan, termasuk PRRI dan Permesta, menandakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Tantangan ini memaksa Soekarno untuk memperkuat kekuasaannya dan mencari jalan tengah untuk mengatasi ketegangan. (Wikipedia - Orde Lama)

Konsep Nasakom

Nasakom adalah konsep yang diperkenalkan Soekarno untuk menyatukan kekuatan nasionalisme, agama, dan komunisme. Berikut adalah cara Nasakom berusaha menggabungkan ideologi yang berbeda:

- a. Integrasi Ideologis: Nasakom mencoba menciptakan platform politik yang inklusif, di mana setiap kelompok memiliki peran. Soekarno berargumen bahwa ketiga ideologi ini saling melengkapi dalam upaya membangun negara.
- b. Pancasila sebagai Dasar: Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologis yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan mencantumkan unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, Pancasila diharapkan menjadi jembatan antara nilai-nilai agama dan komunis.
- c. Penguatan Kebersamaan: Nasakom juga berusaha mengurangi perpecahan dengan mempromosikan ide persatuan dalam keragaman. Soekarno menginginkan agar kelompok-kelompok ini dapat bekerja sama demi kepentingan bangsa.

Konflik dan Ketegangan Ideologis

- a. DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia): Pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. Konflik ini menciptakan ketegangan antara kelompok Islam dan pemerintah.
- b. PRRI/Permesta: Pemberontakan ini muncul dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan otonomi daerah. Ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan daerah dan pusat.
- c. G30S/PKI: Puncak konflik ideologis terjadi dengan kudeta yang didalangi PKI pada tahun 1965. Peristiwa ini mengarah pada pembantaian massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya, serta penggulingan Soekarno.

Ketegangan antara nasionalis, Islam, dan komunis sangat memengaruhi implementasi Pancasila. Ketidakmampuan untuk menyatukan berbagai ideologi ini menciptakan polarisasi yang mendalam, mengarah pada kekacauan politik dan konflik bersenjata.

Dampak Sosial dan Politik

- a. Dampak Politik: Ketegangan ideologis mengakibatkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, termasuk kudeta militer yang menandai akhir Orde Lama dan awal Orde Baru.
- b. Dampak Sosial: Pembantaian dan penindasan terhadap PKI menciptakan trauma kolektif dan dampak sosial yang dalam, termasuk pengucilan sosial bagi yang dianggap simpatisan komunis.

- c. Dampak Ekonomi: Krisis ekonomi memperburuk kondisi masyarakat, menyebabkan kemiskinan dan ketidakpuasan yang meluas.

Peran Pancasila: Pancasila, sebagai ideologi negara, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, kegagalan dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila di tengah konflik ideologis dan ketegangan membuatnya sulit untuk berfungsi sebagai jembatan antara kelompok yang berbeda.

Pancasila di Era Orde Baru (1966-1998)

Setelah kejatuhan Soekarno, Orde Baru di bawah Soeharto mengadopsi Pancasila sebagai ideologi resmi, namun dengan cara yang sering kali otoriter:

- a. Pancasila Sebagai Alat Legitimasi: Soeharto menggunakan Pancasila untuk membenarkan kekuasaannya dan menekan oposisi. Ia menekankan Pancasila sebagai satu-satunya sumber ideologi, menghapus pluralisme.
- b. Penegakan Orde Baru: Meskipun Pancasila dimajukan sebagai ideologi pemersatu, banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi, dan kritik terhadap pemerintah ditekan.
- c. Revitalisasi Pancasila: Pada tahun-tahun terakhir Orde Baru, ada usaha untuk merevitalisasi Pancasila, tetapi sering kali hal ini dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik yang berarti. (Nugroho, R. (2021))

Orde Baru

Kebangkitan Soeharto dan Stabilitas Politik

Setelah kejatuhan Soekarno, Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) pada tahun 1966. Ia menjanjikan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi:

- a. Legitimasi Ideologis:
 - 1) Soeharto menggunakan Pancasila sebagai landasan legitimasi untuk mendukung kebijakan dan tindakannya. Dalam banyak pidato, ia menekankan bahwa Pancasila adalah pilar utama negara yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.
 - 2) Ia mengklaim bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan stabilitas politik dan menghindari konflik ideologis yang sebelumnya mengganggu pemerintahan Soekarno.
- b. Program Pembangunan Ekonomi:
 - 1) Soeharto meluncurkan program-program pembangunan yang ambisius, termasuk pembangunan infrastruktur dan industrialisasi. Pancasila dijadikan simbol keberhasilan pembangunan yang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

- 2) Dengan mengaitkan keberhasilan pembangunan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, Soeharto berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.
- c. Pengendalian Oposisi:
- 1) Pancasila digunakan untuk menjustifikasi penindasan terhadap lawan politik. Organisasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas nasional, yang memudahkan pemerintah untuk membubarkan atau melarang organisasi tersebut. (Hadi, W. (2019).
 - 2) Penekanan pada Pancasila sebagai ideologi negara juga digunakan untuk membangun citra positif pemerintah di mata publik, sambil membungkam kritik.

Program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

Program P4 diluncurkan pada tahun 1978 sebagai instrumen untuk mendorong setiap warga negara menghayati dan mengamalkan Pancasila:

- a. Tujuan dan Rincian Program:
- 1) P4 bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan non-formal. Program ini mencakup materi ajaran Pancasila yang diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di semua tingkat.
 - 2) Setiap pegawai negeri, pelajar, dan anggota masyarakat diwajibkan mengikuti pelatihan P4. Ini mencakup pengajaran tentang sejarah Pancasila, nilai-nilai moral, dan tanggung jawab sebagai warga negara.
- b. Kontrol Sosial-Politik:
- 1) P4 menjadi alat kontrol sosial untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang homogen tentang Pancasila dan tidak terpengaruh oleh ideologi lain yang bertentangan.
 - 2) Melalui program ini, pemerintah berusaha untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan kepatuhan kepada negara. Dengan cara ini, kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai nilai-nilai Pancasila.
- c. Kritik dan Tantangan:
- 1) Meskipun P4 dirancang untuk menanamkan nilai-nilai positif, program ini sering dianggap sebagai propaganda yang tidak efektif. Banyak warga negara melihatnya sebagai beban, bukan sebagai kesempatan untuk memahami ideologi yang seharusnya.

- 2) Seiring waktu, banyak yang menganggap P4 tidak mampu membangun pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, melainkan lebih pada kepatuhan formal.

Pancasila sebagai Asas Tunggal

Pada tahun 1985, Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal untuk semua organisasi dan partai politik:

- a. Penegasan Pancasila:
 - 1) Semua organisasi, baik politik maupun non-politik, diwajibkan untuk mengakui Pancasila sebagai ideologi tunggal. Ini bertujuan untuk menghilangkan pluralisme dan mengonsolidasikan kekuasaan pemerintah.
 - 2) Penetapan ini juga mencakup pembubaran organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk partai-partai yang memiliki ideologi alternatif.
- b. Dampak terhadap Kebebasan Politik:
 - 1) Kebijakan ini menghasilkan pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan politik. Partai-partai politik yang ingin beroperasi harus menyesuaikan diri dengan garis ideologi Pancasila, sehingga banyak suara kritis tidak memiliki saluran untuk disampaikan.
 - 2) Pembatasan ini menyebabkan stagnasi demokrasi, di mana ruang untuk dialog politik dan kritik publik sangat terbatas.
- c. Implikasi bagi Masyarakat:
 - 1) Rakyat yang ingin berpartisipasi dalam politik harus patuh pada asas tunggal ini, yang menciptakan budaya ketakutan dan kepatuhan. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap politik dan mengurangi partisipasi dalam proses demokrasi.
 - 2) Penegasan Pancasila sebagai asas tunggal mengakibatkan homogenisasi pemikiran yang berbahaya bagi perkembangan demokrasi.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Di tengah penggunaan Pancasila sebagai alat legitimasi, praktik KKN merajalela selama era Orde Baru:

- a. Kepentingan Pribadi:
 - 1) KKN menjadi sistematis dalam pemerintahan Soeharto. Banyak pejabat menggunakan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi, menciptakan jaringan korupsi yang luas.

- 2) Penggunaan Pancasila untuk membenarkan tindakan ini menciptakan ironi, di mana nilai-nilai moral dan etika dipergunakan untuk menutupi penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Dampak Sosial dan Ekonomi:
- 1) KKN menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat, memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi mulai merasa terpinggirkan.
 - 2) Rasa ketidakpuasan ini mengarah pada kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan pada Pancasila sebagai ideologi yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan sosial.
- c. Erosi Citra Pancasila:
- Pancasila mulai dipandang sebagai alat untuk membenarkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, bukan sebagai pedoman moral. Hal ini mengurangi integritas Pancasila di mata masyarakat, membuatnya tampak sebagai konsep yang tidak lagi relevan dengan kenyataan. (Santoso, J. (2019).

Gerakan Pro-Demokrasi dan Runtuhnya Orde Baru

Ketidakpuasan publik meningkat menjelang akhir 1990-an, terutama setelah krisis ekonomi 1997:

- a. Protes dan Mobilisasi:
 - 1) Mahasiswa dan aktivis mulai melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi politik dan ekonomi. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pemulihan hak asasi manusia.
 - 2) Gerakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah.
- b. Krisis Ekonomi sebagai Pemicu:
 - 1) Krisis ekonomi Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Inflasi melonjak, nilai tukar rupiah jatuh, dan banyak perusahaan bangkrut, yang semakin meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto.
 - 2) Ketidakpuasan ini menciptakan momentum bagi gerakan pro-demokrasi yang ingin menggulingkan rezim otoriter.

c. Runtuhnya Orde Baru:

- 1) Pada Mei 1998, setelah serangkaian protes besar-besaran, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Kejatuhan Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru dan membuka jalan bagi Reformasi.
- 2) Masyarakat berharap bahwa reformasi akan membawa perubahan yang nyata dalam praktik demokrasi dan pemulihan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya.

Pancasila di Era Reformasi (1998-sekarang)

Setelah jatuhnya Orde Baru, Pancasila menghadapi tantangan dan penyesuaian dalam konteks baru:

a. Pancasila sebagai Dasar Kesepakatan:

- 1) Di era Reformasi, Pancasila kembali dijadikan sebagai dasar ideologi negara, tetapi harus bersaing dengan beragam ideologi dan nilai demokrasi yang berkembang.
- 2) Upaya revitalisasi Pancasila dilakukan melalui pendidikan dan promosi nilai-nilai Pancasila yang lebih inklusif.

b. Kritik dan Penyesuaian:

- 1) Masyarakat mulai kritis terhadap penerapan Pancasila. Ada tuntutan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga diterapkan dalam praktik sehari-hari.
- 2) Pancasila harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam.

c. Peran dalam Demokrasi:

- 1) Pancasila diharapkan dapat mendukung proses demokratisasi dan menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, tantangan tetap ada dalam menghadapi perpecahan sosial dan politik yang muncul. (Yunita, R. (2020)

Reformasi

Transisi Menuju Demokrasi

Era Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998 setelah kejatuhan Soeharto, menandai fase penting dalam perjalanan politik Indonesia, di mana Pancasila memainkan peran sentral dalam membentuk kerangka demokrasi yang baru.

a. Dasar Legitimasi Demokrasi:

- 1) Pancasila dijadikan sebagai landasan ideologis dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, Pancasila

berfungsi sebagai simbol dari harapan akan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

- 2) Di dalam dokumen dan pidato penting, pemimpin reformasi menekankan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dalam menciptakan sistem yang mendorong partisipasi rakyat, di mana suara setiap individu dihargai dalam pengambilan keputusan politik.
- b. Pendorong Kesatuan Nasional:
- 1) Dalam situasi yang rentan terhadap perpecahan sosial, Pancasila berperan sebagai alat pemersatu. Nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong masyarakat untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
 - 2) Pancasila menjadi titik temu bagi berbagai kelompok etnis dan agama untuk saling menghormati dan bekerja sama, mengingatkan mereka akan pentingnya kerukunan dan solidaritas sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara.
- c. Konsolidasi Demokrasi:
- 1) Proses demokratisasi yang terjadi setelah Reformasi membawa berbagai perubahan dalam struktur politik. Pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, serta keberadaan partai politik yang beragam, menjadi tanda nyata dari pergeseran ini.
 - 2) Pancasila diharapkan dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan publik yang menghargai demokrasi, keadilan, dan keberagaman. (Ricklefs, M. C. (2018).

Pluralisme dan Kebebasan Berpendapat

Pancasila, di era Reformasi, mengalami interpretasi yang lebih inklusif yang mendukung pluralisme:

- a. Inklusi dalam Kerangka Demokrasi:
- 1) Pancasila dipandang sebagai fondasi yang mengakui keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, Pancasila mendorong terciptanya ruang untuk dialog yang konstruktif di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.
 - 2) Interpretasi Pancasila yang lebih inklusif memungkinkan adanya pengakuan terhadap hak-hak minoritas, menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi partisipasi aktif semua warga negara dalam proses politik.
- b. Jaminan Kebebasan Berpendapat:
- 1) Dalam konteks kebebasan berpendapat, Pancasila mendukung hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Prinsip-prinsip

Pancasila menekankan pentingnya dialog dan komunikasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.

- 2) Kebebasan berpendapat, sebagai bagian dari hak asasi manusia, dilindungi oleh nilai-nilai Pancasila. Ini mengarah pada meningkatnya keberanian masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Praktik Pluralisme:
- 1) Di tingkat lokal, banyak inisiatif masyarakat yang mendorong dialog lintas agama dan budaya untuk memperkuat pluralisme. Kegiatan seperti forum antaragama dan diskusi publik menjadi sarana untuk membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerjasama antar kelompok.

Radikalisasi dan Intoleransi

Meskipun Pancasila mendukung pluralisme, tantangan baru muncul di era Reformasi, khususnya terkait radikalisasi dan intoleransi:

- a. Radikalisasi Agama:
- 1) Beberapa kelompok ekstremis mulai mengekspresikan pandangan intoleran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Radikalisasi ini sering kali diiringi dengan aksi-aksi kekerasan yang mengancam keberagaman dan stabilitas sosial.
 - 2) Kasus-kasus kekerasan berbasis agama dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa meskipun Pancasila mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, implementasinya sering kali terabaikan dalam praktik.
- b. Intoleransi Sosial:
- 1) Intoleransi sosial yang meningkat dapat dilihat dari meningkatnya konflik antar kelompok yang beragam, baik berdasarkan etnis maupun agama. Ketegangan ini sering kali dipicu oleh propaganda yang memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok lain.
 - 2) Pancasila sebagai ideologi yang menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama harus diaktualisasikan dalam kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat untuk mengatasi masalah ini.
- c. Respon terhadap Tantangan:
- 1) Untuk menghadapi tantangan radikalisasi dan intoleransi, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda.

- 2) Dialog antarumat beragama dan program-program yang mempromosikan toleransi harus didorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

Ketidakadilan Sosial dan Kesenjangan Ekonomi

Era Reformasi juga diwarnai oleh tantangan ekonomi yang signifikan, dengan kesenjangan sosial yang semakin meningkat:

- a. Kesenjangan Sosial yang Meningkat:
 - 1) Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pasca-Reformasi, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar. Banyak masyarakat yang terpinggirkan masih berjuang untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
 - 2) Pancasila, dengan penekanan pada keadilan sosial, dapat berfungsi sebagai panduan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat yang kurang beruntung.
- b. Aktualisasi Pancasila:
 - 1) Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi ketidakadilan, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, penyediaan akses pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan layanan kesehatan.
 - 2) Program-program sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih adil dan seimbang.
- c. Peran Masyarakat:
 - 1) Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempromosikan keadilan sosial. Melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, warga negara dapat mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan dan aspirasi mereka.
 - 2) Gerakan sosial yang mendukung keadilan dan kesetaraan harus didorong untuk memperkuat implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (Wasis, et al. (2020).

Peran Pemerintah dan Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila di era Reformasi sangat penting untuk membangun kesadaran generasi muda:

- a. Pendidikan Pancasila di Sekolah:
 - 1) Integrasi pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa generasi muda memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam.

- 2) Materi ajaran Pancasila harus mencakup sejarah, filosofi, serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, agar siswa dapat menghayati dan mengamalkan Pancasila secara nyata.
- b. Kesadaran Generasi Muda:
- 1) Pendidikan Pancasila juga harus diarahkan untuk membangun karakter dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kegiatan yang melibatkan praktik langsung, seperti proyek sosial dan diskusi publik, dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila di kalangan generasi muda.
 - 2) Melalui berbagai program ekstrakurikuler, seperti seminar dan pelatihan, siswa dapat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan mereka.
- c. Peran Lembaga Pendidikan:
- 1) Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan ideologi Pancasila di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.
 - 2) Kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam merancang program pendidikan Pancasila yang relevan dan menarik dapat meningkatkan efektivitas pendidikan tersebut. (Syukri, A. (2017))

Perbandingan Penerapan Pancasila di Tiga Era

a. **Era Orde Lama (1945-1966):**

- 1) Pancasila sebagai dasar negara yang dibangun dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Terdapat pluralisme ideologis, tetapi juga konflik antara berbagai kelompok.
- 2) Pancasila dipakai sebagai alat pemersatu, tetapi seringkali tidak dapat mencegah perpecahan ideologis.

b. **Era Orde Baru (1966-1998):**

- 1) Pancasila dipaksakan sebagai asas tunggal, digunakan untuk legitimasi kekuasaan, dan menekan kebebasan politik. Praktik KKN merajalela, menciptakan jarak antara idealisme Pancasila dan realitas.
- 2) Penggunaan Pancasila bersifat otoriter, dengan penekanan pada kepatuhan tanpa memberikan ruang untuk kritik.

c. Era Reformasi (1998-sekarang):

- 1) Pancasila diinterpretasikan secara lebih inklusif, mendukung pluralisme dan kebebasan berpendapat. Namun, tantangan baru muncul dengan radikalisasi dan intoleransi.
- 2) Pancasila diharapkan menjadi panduan dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab, tetapi perlu adanya upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan.

5. KESIMPULAN

peran Pancasila dalam era Reformasi menunjukkan bahwa ideologi ini terus menjadi landasan utama dalam upaya membangun kembali sistem demokrasi Indonesia setelah kejatuhan Orde Baru. Pancasila, yang telah berfungsi sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan, dihadapkan pada tantangan-tantangan baru dalam masyarakat yang semakin plural dan dinamis. Pada masa Orde Baru, Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi oleh pemerintah otoriter, namun pada era Reformasi, Pancasila mengalami reaktualisasi dalam konteks demokrasi yang lebih inklusif.

Era Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998, membawa perubahan besar dalam struktur politik dan sosial Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah kebebasan politik yang lebih besar dan penerapan pemilu yang lebih transparan dan adil. Dalam konteks ini, Pancasila tidak lagi dipaksakan sebagai asas tunggal, melainkan diinterpretasikan secara lebih fleksibel dan inklusif. Hal ini memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menyuarakan pandangan mereka secara lebih bebas, termasuk hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Pancasila, dengan prinsip-prinsipnya, tetap menjadi panduan moral yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, sambil tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Namun, tantangan baru muncul seiring dengan meningkatnya radikalisasi agama dan intoleransi di tengah masyarakat. Beberapa kelompok ekstremis mencoba merusak prinsip-prinsip kemanusiaan dan persatuan yang diusung oleh Pancasila. Fenomena radikalisasi ini sering kali disertai dengan aksi kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, yang bertentangan dengan semangat pluralisme yang dijunjung oleh Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka memahami pentingnya keberagaman dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain tantangan sosial, era Reformasi juga diwarnai oleh kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat. Meskipun Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin tetap menjadi masalah yang signifikan. Banyak masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dalam konteks ini, Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, dapat berfungsi sebagai panduan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemerintah diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan merancang program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan seimbang.

Pendidikan Pancasila di era Reformasi juga menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran generasi muda tentang nilai-nilai dasar negara ini. Pendidikan formal yang mengintegrasikan ajaran Pancasila harus mencakup sejarah, filosofi, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, siswa dapat menghayati Pancasila bukan hanya sebagai konsep teoritis, tetapi sebagai panduan nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, pendidikan Pancasila diharapkan dapat membangun karakter generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam memperkuat demokrasi dan keadilan sosial.

Pancasila tetap relevan dan vital dalam era Reformasi, meskipun menghadapi tantangan-tantangan baru. Dalam dunia yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan untuk menjawab masalah-masalah kontemporer seperti radikalisme, intoleransi, kesenjangan sosial, dan perubahan politik global. Dengan memperkuat pendidikan dan dialog lintas kelompok, Pancasila dapat terus menjadi fondasi yang kokoh bagi persatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, W. (2019). Pancasila and the abuse of power: A critical reflection on Indonesia's New Order era. *Indonesian Journal of Political Science*.
- Nugroho, R. (2021). Pancasila and national unity: A historical review of the New Order era. *Journal of Indonesian Studies*.
- Ricklefs, M. C. (2018). *A history of modern Indonesia*.
- Santoso, J. (2019). Revisiting the role of Pancasila in combating KKN during the New Order.

Syukri, A. (2017). Pancasila dalam perspektif demokrasi di era reformasi.

Wasis, et al. (2020). Optimization with fuzzy multiple criteria decision making for public policy.

Wikipedia. (n.d.). Orde Lama. *Wikipedia*.

Yunita, R. (2020). Pancasila as a political legitimacy: The legacy of the New Order in Indonesia. *Indonesian Journal of Political Science*.